

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya dalam pembangunan di Indonesia, karena penerimaan negara dari pos pajak menduduki porsi jumlah terbesar dibandingkan dengan penerimaan dari pos minyak bumi ataupun gas alam. Pajak di Indonesia menurut pemungutan dan pengelolaannya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat memiliki 5 (lima) jenis pajak, sedangkan pajak daerah memiliki 16 (enam belas) jenis dimana pajak tersebut dibagi menjadi 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota (<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling besar dibandingkan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah, laba perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak daerah yang menjadi hak bagi pemerintah dan dipandang sangat penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak daerah tersebut diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan oleh Yunus (2010:91) yang pernah melakukan penelitian mengenai kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Gorontalo, yang hasilnya menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang relatif lebih besar terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2006 sampai dengan tahun

2009 yaitu dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,176%. Selain itu, menurut Rahmat Hidayat: selama kurun waktu tahun 2000 hingga 2010, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor memberikan peranan yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta dari lima pajak provinsi yang ada, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang menjadi andalan dalam pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Tengah.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan, bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kota Bandung dilaksanakan di Sistem Administrasi Dibawah Satu Atap (SAMSAT). Pembayaran oleh wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat dilakukan pada kantor cabang kas daerah di SAMSAT, dimana pada umumnya kantor SAMSAT tersebar di setiap kota maupun daerah Provinsi Jawa Barat.

Kemacetan merupakan hal yang biasa terjadi di Kota Bandung. Salah satu penyebab kemacetan ini adalah meningkatnya jumlah *volume* kendaraan bermotor. Kondisi ini menggambarkan pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Bandung

terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya daya beli masyarakat dan murahnya biaya untuk kredit kendaraan bermotor. Hanya dengan membawa uang muka maka kendaraan idaman pun dapat langsung dibawa pulang. Meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor baru maupun kendaraan bermotor bekas mengakibatkan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang diterima Kota Bandung juga meningkat.

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “**Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kota Bandung Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor Kota Bandung terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2012 secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor Kota Bandung terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2012 secara parsial?

3. Seberapa besar pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Kota Bandung terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2012 secara simultan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor Kota Bandung terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2012 secara parsial.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor Kota Bandung terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2012 secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Kota Bandung terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2012 secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat bagi akademisi:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai besarnya pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Kota Bandung terhadap pendapatan asli daerah Provinsi

Jawa Barat. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

2. Manfaat bagi praktisi bisnis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dalam mengelola pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor serta membuat keputusan dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung.